

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Studi ini menginvestigasi pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Objek dari penelitian ini yakni perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Penggunaan perusahaan manufaktur untuk objek penelitian ini karena merupakan salah satu sektor industri yang paling dominan di pasar modal serta memiliki karakteristik operasional dan struktur keuangan yang kompleks, sehingga berpotensi tinggi melakukan praktik penghindaran pajak. Kompleksitas tersebut mencakup biaya produksi, struktur aset tetap yang besar, serta variasi dalam kebijakan akuntansi dan pengelolaan pajak.

Selain itu, perusahaan manufaktur umumnya memiliki eksposur yang lebih tinggi terhadap peraturan perpajakan karena skala usahanya yang luas dan beragam aktivitas usaha. Oleh karena itu, tata *good corporate governance* menjadi aspek penting untuk dikaji dalam konteks pengendalian penghindaran pajak. Praktik *good corporate governance* yang baik, dianggap mampu membatasi tindakan oportunistik manajemen termasuk dalam hal manipulasi beban pajak. Melalui teknik *purposive sampling*, di dapatkan hasil pengumpulan sampel data yang telah sesuai dengan kriteria penentuan sampel.

Tabel 4. 1 Hasil Pemilihan Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar secara konsisten di BEI selama periode 2021-2023	350
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data-data yang akan digunakan untuk penelitian di <i>bloomberg</i>	(298)
	Jumlah Sampel x Jumlah Tahun Pengamatan (52x3)	156
4.	Data outlier	(14)
	Total Sampel Penelitian setelah Outlier	142

Sumber : Data diolah, 2025

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk mengukur variabel dependen penghindaran pajak serta variabel independen seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Statistik deskriptif juga digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data, seperti nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi untuk masing-masing variabel.

Tabel 4. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	142	-,44	,76	,1900	,22075
Kepemilikan Manajerial	142	,00	708.542,00	15.264,8501	69.057,11685

Kepemilikan Institusional	142	,00	921.251,00	175.287,690 0	290.036,74402
Dewan Komisaris Independen	142	,25	,83	,4312	,11245
Komite Audit	142	1,00	4,00	1,7606	,95226
Kualitas Audit	142	,00	1,00	,6479	,47932
Valid N (listwise)	142				

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan dapat dijabarkan dari masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Penghindaran Pajak (Y)

Pada tabel di atas, dapat diketahui nilai minimum dari penghindaran pajak 0,44 dan nilai maksimum dari penghindaran pajak sebesar 0,76, dengan nilai mean (rata-rata) dari variabel penghindaran pajak sebesar 0,1900 serta standar deviasi sebesar 0,22075. Nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat penghindaran pajak perusahaan dalam sampel penelitian cukup rendah. Nilai standar deviasi yang relatif kecil menandakan bahwa data penghindaran pajak bersifat homogen.

b. Kepemilikan Manajerial (X_1)

Pada tabel di atas, dapat diketahui nilai minimum kepemilikan manajerial sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 708.264,00 dengan

nilai rata-rata dari variabel kepemilikan manajerial sebesar 15.264,8501 serta standar deviasi sebesar 69.057,11685. Nilai rata-rata yang jauh lebih kecil dibanding nilai maksimum menunjukkan bahwa hanya sedikit perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial dalam jumlah besar, sedangkan sebagian besar berada pada tingkat rendah. Nilai standar deviasi yang tinggi menandakan penyebaran data yang sangat bervariasi

c. Kepemilikan Institusional

Pada tabel di atas, dapat diketahui nilai minimum kepemilikan institusional sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 921.251,00. Nilai rata-rata dari variabel kepemilikan institusional sebesar 175.287,6900 dengan standar deviasi sebesar 290.036,74402. Nilai standar deviasi yang besar menunjukkan adanya penyebaran data yang tinggi atau variasi yang signifikan antar perusahaan dalam hal kepemilikan institusional.

d. Dewan Komisaris Independen

Dalam penelitian ini, komisaris independen diukur dengan jumlah komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris perusahaan. Pada tabel di atas, dapat diketahui nilai maksimum komisaris independen sebesar 0,83 dan nilai minimum sebesar 0,25 serta nilai rata-rata sebesar 0,4312 dengan standar deviasi sebesar 0,11425. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata komisaris independen sebesar 0,4312 telah memenuhi Kode Etik Komite Nasional (KEN) merekomendasikan

sekurang-kurangnya 30%. Standar deviasi komisaris independen lebih kecil dari nilai rata-ratanya, ini menunjukkan variasi data dikatakan terpusat karena semakin kecil nilai standar deviasi, maka semakin dekat data dengan rata-rata dan data dikatakan terpusat.

e. Komite Audit

Pada tabel di atas, dapat diketahui nilai minimum komite audit sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 4, dengan nilai rata-rata sebesar 1,7606 serta standar deviasi sebesar 0,95226. Hal ini mengidentifikasi bahwa sebagian besar perusahaan memiliki komite audit dengan jumlah anggota 1 hingga 2 orang, meskipun ada beberapa yang lebih banyak

f. Kualitas Audit

Pada tabel di atas, dapat diketahui nilai minimum kualitas audit sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1. Nilai rata-rata dari variabel kualitas audit sebesar 0,6479 dan standar deviasi sebesar 0,47932. Hal ini menunjukkan bahwa 65% perusahaan dalam sampel penelitian di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) berkualitas tinggi.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas guna mengamati nilai residual terdistribusi normal atau tidak dalam model regresi (Gozali, 2021). Model regresi yang dianggap baik apabila nilai residual memiliki distribusi normal. Hasil dari uji normalitas

digunakan sebagai langkah awal dalam melakukan uji statistik ataupun uji hipotesis. Berikut ini tabel Uji Normalitas Kolmogorav

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas

			Unstandardized Residual
N			142
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,21117997
Most Extreme Differences	Absolute		,071
	Positive		,071
	Negative		-,047
Test Statistic			,071
Asymp. Sig. (2-tailed)			,079 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,463 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,450
		Upper Bound	,475

Sumber : Data diolah, 2025

Pada tabel hasil uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) diketahui nilai Asymp. Signifikan sebesar 0,079 dan nilai tersebut $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini guna meninjau ada atau tidaknya korelasi pada setiap variabel bebas. Model regresi dianggap baik jika terbebas dari multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Berikut tabel yang menampilkan hasil uji multikolinearitas.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KEPEMILIKAN MANAJERIAL	,987	1,013
	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	,978	1,023
	DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN	,982	1,018
	KOMITE AUDIT	,992	1,008
	KUALITAS AUDIT	,981	1,019

Sumber : Data diolah,2025

Pada tabel menampilkan hasil uji multikolinearitas, dalam tabel menunjukkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan pada masing-masing variabel independen memenuhi persyaratan pengujian yakni lebih dari 0,10 untuk nilai tolerance dan kurang dari 10 untuk nilai VIF.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Penggunaan uji ini guna memeriksa dalam model regresi ada atau tidaknya ketidaksamaan varian nilai residual antar pengamatan. Model regresi yang baik yaitu tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Tabel berikut menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Glejser.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,219	,052		4,245	,000
	KEPEMILIKAN MANAJERIAL	2,846E-7	,000	,142	1,701	,091
	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	1,346E-8	,000	,028	,336	,737
	DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN	-,101	,103	-,083	-,984	,327
	KOMITE AUDIT	,004	,012	,028	,336	,738
	KUALITAS AUDIT	-,047	,024	-,162	-1,926	,056

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel memperlihatkan hasil uji heteroskedastisitas yang kemudian disimpulkan bahwasannya model regresi bebas dari terjadinya heteroskedastisitas karena setiap variabel independen memiliki probabilitas signifikan melebihi 0,05

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dalam analisis regresi untuk memastikan apakah ada hubungan linier antara residual pada waktu sekarang dan residual pada waktu sebelumnya dalam model regresi. Tujuan utama dari uji adalah untuk memastikan bahwa asumsi independensi residual terpenuhi, atau untuk menghindari hal-hal seperti residual pada waktu sekarang yang tidak sesuai dengan kenyataan, bias estimasi, menjamin validasi pengujian statistik, dan mempercepat pengembangan model.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson	Kategori	Keputusan
1	1,720	$d_L < d < d_U$	No desicion

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diatas, menunjukkan bahwa nilai $D_{Whitung}$ sebesar 1,720 sedangkan dari hasil D_{Wtabel} $n = 142$, $k = 5$ dengan $\alpha = 0,05$ diperoleh D_{Wtabel} $d_L = 1.6536$ dan $d_U = 1.7992$, hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah autokorelasi. Dapat dilihat dari adanya nilai $D_{Whitung}$ sebesar 1,720 yang ada di antara d_U serta d_L , berdasarkan kriteria pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi kondisi ini masuk dalam area no desicion, yang artinya tidak dapat ditarik kesimpulan secara pasti apakah terdapat autokorelasi atau tidak.

Tabel 4. 7 Pengobatan Aukorelasi metode Cochran-Orcutt

Model	Durbin-Watson	Kategori	Keputusan
1	1.977	$d_U < d < 4-d_U$	Tidak Ditolak

Sumber : Data diolah, 2025

Untuk mengatasi ketidakpastian ini, maka dilakukan pengobatan dengan menggunakan metode Cochran-Orcutt. Setelah metode ini diterapkan, nilai DW meningkat menjadi 1.944. nilai ini ada dalam rentang $1.7992 < 1.944 < 2.2008$ ($d_U < d < 4 - d_U$), yang menunjukkan bahwasannya model regresi setelah pengobatan telah bebas dari masalah autokorelasi.

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. 8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	,219	,052
	KEPEMILIKAN MANAJERIAL	2,846E-7	,000
	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	1,346E-8	,000
	DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN	-,101	,103
	KOMITE AUDIT	,004	,012
	KUALITAS AUDIT	-,047	,024

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,219 + 2,846E-7X_1 + 1,346E-8X_2 - 0,101X_3 + 0,004X_4 - 0,047X_5$$

Keterangan :

Y = Penghindaran Pajak

X₁ = Kepemilikan Manajerial

X₂ = Kepemilikan Institusional

X₃ = Dewan Komisaris Independen

X₄ = Komite Audit

X₅ = Kualitas Audit

Dari hasil tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 0,219 hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen bernilai nol, maka penghindaran pajak berada pada angka 0,219.
2. sebesar $2,846E-7$. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial, cenderung meningkatkan penghindaran pajak.
3. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan institusional sebesar $1,346E-8$ mengindikasikan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat mendorong praktik penghindaran pajak jika institusi tersebut lebih berfokus kepada laba jangka pendek dan efisiensi pajak.
4. Nilai koefisien regresi variabel dewan komisaris independen sebesar -0,101. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka praktik penghindaran pajak semakin menurun.
5. Nilai koefisien regresi variabel komite audit sebesar 0,004 mengindikasikan bahwa variabel komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit belum berperan optimal dalam menekan penghindaran pajak.

6. Nilai koefisien regresi variabel kualitas audit sebesar -0,047 mengindikasikan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas audit yang dilakukan oleh auditor berkualitas tinggi cenderung mampu menekan praktik penghindaran pajak.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variabel terikat. Nilai R^2 yang diubah menunjukkan seberapa besar korelasi antar variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Tabel berikut menunjukkan hasil uji koefisiensi determinasi

Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,291 ^a	,085	,051	,21503	1,720

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel diatas menunjukkan nilai adjusted R^2 adalah 0,051 (5,1%). Hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini memengaruhi variabel dependen sebesar 5,1%, sedangkan sisanya 94,1% (1-0,051) dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian.

4.2.4.2. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian uji simultan (uji F) digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas di penelitian memengaruhi secara signifikan terhadap variabel terikatnya. Apabila F sig di bawah 0,05 mengindikasikan keseluruhan variabel bebas memengaruhi keseluruhan terhadap variabel terikat maupun sebaliknya. Berikut tabel uji simultan.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,583	5	,117	2,521	,032 ^b
	Residual	6,288	136	,046		
	Total	6,871	141			

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F sebesar 2,521 dengan nilai signifikansi sebesar 0,032. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 oleh karena itu, model regresi dapat digunakan untuk memperkirakan variabel penghindaran pajak. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit secara simultan memiliki pengaruh signifikansi terhadap penghindaran pajak.

4.2.4.3. Uji Parsial (Uji T)

Pengujian parsial (uji T) dilakukan untuk melihat seberapa signifikansi setiap variabel. Jika nilai probabilitas signifikansi kurang dari 0,05 maka, uji ini dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa signifikan pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,010	,082		-,118	,906
	KEPEMILIKAN MANAJERIAL	1,687E-7	,000	,053	,639	,524
	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	6,071E-8	,000	,080	,961	,338
	DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN	,272	,162	,138	1,672	,097
	KOMITE AUDIT	,002	,019	,010	,118	,906
	KUALITAS AUDIT	,101	,038	,219	2,645	,009

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel diatas memperlihatkan hasil uji T dengan variabel kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dikarenakan nilai signifikansi di bawah 0,05 sedangkan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit

tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dikarenakan nilai signifikansi melebihi 0,05.

Berdasarkan tabel hasil penelitian di atas dapat diuraikan bahwa pengujian hipotesis pertama digunakan untuk menguji apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi dari variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,524 hal ini menunjukkan nilai signifikansinya berada di atas 0,05 dan nilai t sebesar 0,639. Oleh karena itu, H_1 tidak didukung hasil penelitian.

Pengujian hipotesis kedua digunakan untuk menguji apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi dari variabel kepemilikan institusional sebesar 0,338 hal ini menunjukkan nilai signifikansinya di atas 0,05 dan nilai t sebesar 0,961. Oleh karena itu, H_2 tidak didukung hasil penelitian.

Pengujian hipotesis ketiga digunakan untuk menguji apakah komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikan dari variabel komisaris independen sebesar 0,097 hal ini menunjukkan nilai signifikansinya berada di atas 0,05 dan nilai t sebesar 1,248. Oleh karena itu, H_3 tidak didukung temuan penelitian.

Pengujian hipotesis keempat digunakan untuk menguji apakah komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi dari variabel komite audit sebesar 0,906 hal ini menunjukkan

nilai signifikansinya berada di atas 0,05 dan nilai t sebesar 0,118. Oleh karena itu, H₄ tidak didukung temuan penelitian.

Pengujian hipotesis kelima digunakan untuk menguji apakah kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi dari variabel kualitas audit sebesar 0,009 hal ini menunjukkan nilai signifikansinya berada di bawah 0,05 dan nilai t sebesar 2,645. Oleh karena itu, H₅ didukung oleh data empiris.

4.3 Interpretasi Hasil

Interpretasi hasil mengenai pengaruh antara good corporate governance (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit) terhadap penghindaran pajak setelah dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Interpretasi Hasil

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	Tidak didukung
H2	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	Tidak didukung

H3	Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	Tidak didukung
H4	Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	Tidak didukung
H5	Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	Didukung

4.3.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikan sebesar 0,524 dan koefisien regresi sebesar 1,687E-7 terhadap *CETR* dengan arah positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besarnya kepemilikan manajerial tidak serta-merta mendorong peningkatan strategi penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama tidak didukung karena arah pengaruhnya tidak sesuai dengan hipotesis awal.

Dalam konteks teori keagenan, seharusnya semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin kecil konflik kepentingan antara agen dan prinsipal karena manajemen turut memiliki kepentingan dalam perusahaan.

Namun pada praktiknya, kepemilikan manajerial tidak selalu disertai dengan niat untuk melakukan efisiensi pajak.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hadi & Mangoting, 2014 ; Murtina et al. (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan penghindaran pajak karena manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang dalam perusahaan.

4.3.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kedua menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,338 dan koefisien regresi sebesar 6,071E-8 terhadap *CETR* dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan institusi sebagai pemegang saham belum tentu berkorelasi dengan strategi efisiensi pajak yang agresif. Oleh karena itu, hipotesis kedua tidak didukung, karena arah pengaruh tidak sesuai dengan hipotesis awal.

Meskipun kepemilikan institusional diasumsikan mampu mengawasi kinerja manajemen dan mendorong efisiensi, dalam konteks Indonesia hal ini tidak selalu terjadi. Keberadaan institusi sebagai pemegang saham belum tentu berkorelasi dengan strategi efisiensi pajak yang agresif. Sebagian investor institusional justru lebih menekankan pentingnya transparansi dan tata kelola yang baik dari pada mendorong pengurangan kewajiban pajak

secara agresif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan oleh (Oktaviyani & Munandar, 2017 ; Lanis & Richardson, 2011 ; Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Hal ini karena adanya keikutsertaan kepemilikan institusional dalam mendorong efektivitas pengawasan dan pengelolaan kinerja perusahaan, yang dimana lebih mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaannya kepada dewan komisaris yang juga merupakan tugas mereka, sehingga dengan ada tidaknya kepemilikan institusional pada suatu perusahaan tindakan penghindaran pajak masih dapat terjadi (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

4.3.3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikan sebesar 0,097 dan koefisien regresi sebesar 0,272 terhadap *CETR* dengan arah positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran dewan komisaris independen belum optimal. Oleh karena itu, hipotesis ketiga ditolak, karena tidak signifikan.

Namun dalam konteks Indonesia, perselisihan keagenan muncul antara principal dengan principal lainnya (Gunarsih, 2023). Dalam penelitian ini muncul konflik antara pemegang saham sebagai pemeran utama dan pemerintah sebagai pemeran lainnya. Pemerintah ingin perusahaan membayar pajak berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh melalui

agen barang mewah. Di sisi lain, pemegang saham menginginkan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi. Oleh karena itu, para manajer (agen) yang dipercayakan dan ditunjuk oleh pemegang saham yang merupakan pelanggan utama cenderung mengutamakan kepentingan pemegang saham. Akibatnya, pemilik usaha menerapkan kebijakan penghindaran pajak. Diharapkan kebijakan penghindaran pajak ini dapat diterima dengan baik oleh pemegang saham dan meningkatkan laba bersih perusahaan. Alternatif yang bisa dilakukan adalah penghindaran pajak untuk meningkatkan laba bersih perusahaan sekaligus memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, adanya konflik antara keduanya akan mendorong penghindaran pajak.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Upaya dewan komisaris independen untuk mengurangi penghindaran pajak dapat menjadi tidak efektif karena hal-hal seperti penegakan hukum pajak yang lemah, norma budaya yang toleran terhadap penghindaran pajak, dan peraturan pajak yang kompleks. Selain itu, dewan komisaris independen mungkin dapat mengawasi manajemen jika perusahaan memiliki struktur tata kelola yang lemah, seperti dewan direksi yang tidak efektif atau

kepemilikan saham yang terkonsentrasi (Susandy & Anggraeni, 2018).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Murtina et al., 2020) yang menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini menunjukkan bahwa ada sedikit atau banyaknya komisaris independen tidak mempengaruhi manajemen untuk tetap melakukan penghindaran pajak. Penelitian serupa oleh (Hilmi et al., 2022) yang menyatakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak efektif untuk usaha pencegahan tindakan penghindaran pajak.

4.3.4. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis keempat menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,906 dan koefisien regresi sebesar 0,002 terhadap *CETR* dengan arah positif. Nilai signifikansi yang jauh di atas batas 0,05 mengindikasikan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, arah hubungan yang positif tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini tidak didukung.

Komite audit yang idealnya berfungsi sebagai pengawas sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan belum mampu memberikan pengaruh signifikan dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya kualitas komite audit dalam hal

kompetensi dan intensitas pertemuan (Hendrawaty & Meiranto, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Praditasari & Setiawan, 2017) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Penelitian serupa oleh (Maharani & Suardana, 2014) yang mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

4.3.5. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kelima menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil uji *t* menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,009 dan koefisien regresi sebesar 0,101 terhadap *CETR* dengan arah positif. Pada penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, jika *CETR* positif menandakan penghindaran pajak menurun, artinya perusahaan yang diaudit oleh auditor berkualitas tinggi, seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four*, cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola kewajiban pajak. auditor dengan reputasi baik biasanya memiliki standar kepatuhan dan independensi yang tinggi, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap perpajakan (Hanlon et al., 2011). Oleh karena itu, hipotesis kelima didukung karena berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Murtina et al., 2020) yang menyimpulkan bahwa perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *The Big Four* akan lebih dipercaya oleh fiskus karena KAP *The*

Big Four memiliki integritas kerja yang tinggi dan selalu menerapkan peraturan yang berlaku. Apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP The *Big Four* akan semakin sulit untuk melakukan kebijakan pajak agresif.